



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
KOMISI VI DPR RI  
KE KOTA MANADO, SULAWESI UTARA**



**PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023**

**TANGGAL 27 - 29 JANUARI 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**REPUBLIK INDONESIA**

**2023**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, dan Investasi melakukan kunjungan kerja ke daerah guna mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023, Komisi VI DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Januari 2023.

### **B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja**

Secara umum kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, kinerja beberapa BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Secara khusus, kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja operasional perusahaan dan rencana serta program kerja yang akan dilakukan setelah perusahaan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam kaitannya pembangunan infrastruktur tegangan tinggi di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, Sulawesi Utara.

### **C. Objek Kunjungan Kerja**

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, beberapa pihak yang akan terlibat antara lain:

1. Perusahaan BUMN (Termasuk Anak Perusahaan BUMN) antara lain PT PLN (Persero)

#### D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

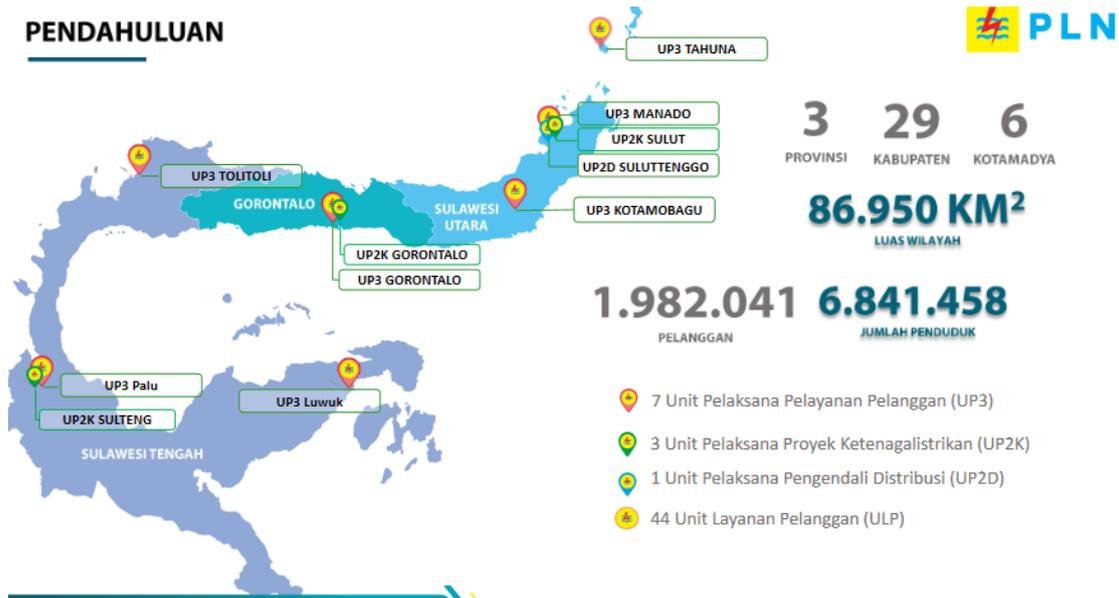
NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-318	M. SARMUJI, S.E., M.Si	PIMP. / F. PGOLKAR
2.	A-199	Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.	KETUA TIM/F. PDIP
3.	A-170	RIEKE DIAH PITALOKA	F. PDIP
4.	A-327	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.	F. PG
5.	A-348	TRIFENA M. TINAL, B.Sc.	F. PG
6.	A-128	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.	F. GERINDRA
7.	A-131	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG	F. PGERINDRA
8.	A-115	KHILMI	F. PGERINDRA
9.	A-36	Ir. H.M. NASIM KHAN	F. PKB
10.	A-11	TOMMY KURNIAWAN	F. PKB
11.	A-563	PUTU SUPADMA RUDANA	F. PD
12.	A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	F. PAN

#### II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara hybrid mengingat pada tanggal 27 Januari 2023, Kota Manado diterjang cuaca buruk selama beberapa jam mengakibatkan pesawat rombongan tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI dan perwakilan BUMN tidak dapat mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Sehingga Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI terpaksa mengadakan rapat di ruangan bandara udara Sultan Babullah, Tarnate, Provinsi Maluku Utara. Beberapa informasi yang disampaikan oleh mitra kerja Komisi VI DPR RI pada saat kunjungan kerja spesifik Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022/2023 ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara secara terperinci sebagai berikut :

1. Penjelasan mengenai Sistem Kelistrikan Sulawesi Utara dengan Total Kapasitas Pembangkit di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 589 MW dengan 174 Unit Pembangkit. Jumlah Gardu Induk 19 Unit dengan kapasitas total 1.196 MVA.
2. Rencana pembangunan sistem kelistrikan sesuai RUPTL 2021-2030:• Pembangkit dengan total Kapasitas 783,09 MW pada tahun 2030. Jaringan Transmisi dengan total Panjang 992 kms. Gardu Induk dengan total kapasitas 560 MVA.

## PENDAHULUAN



3. Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Likupang memiliki luas 197,4 ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Pengembang Kawasan pariwisata terintegrasi wisata oleh PT Minahasa Permai Resort Development. PLN Suluttenggo memiliki beberapa tahapan pengembangan kelistrikan wilayah tersebut:

### RENCANA PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DPSP LIKUPANG



Kawasan Ekonomi Khusus Likupang memiliki luas 197,4 ha (seratus sembilan puluh tujuh koma empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Pengembang Kawasan pariwisata terintegrasi wisata oleh PT Minahasa Permai Resort Development.

Potensi penyambungan pelanggan Kawasan KEK 49,66 MVA

Untuk memasok KEK Likupang disuplai dari GI Likupang dengan jarak kurang lebih 23 kms.

Tahapan Pengembangan Kelistrikan DPSP Likupang :

Tahap 1 : Penyambungan Pelanggan dan Peningkatan keandalan Jaringan Eksisting

- Reroute Jaringan eksisting yang melewati hutan
- Pembangunan Gardu hubung
- Penyambungan pelanggan

Tahap 2 : Penyambungan Pelanggan Baru

- Pembangunan SKTM tersebar keluaran GH ke lokasi DPSP Likupang
- Pembangunan section penyulang di KEK

Tahap 3 : Perkuatan Suplai Tenaga Listrik ke lokasi DPSP

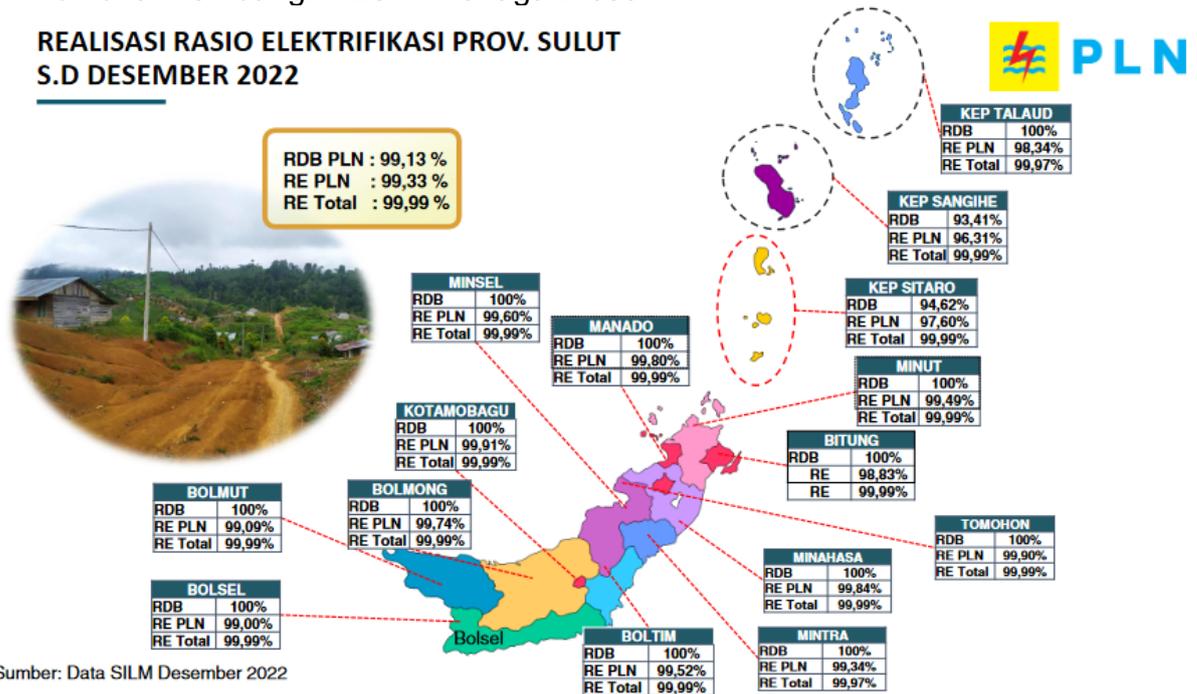
- Pembangunan penyulang ekspres dari GI Likupang ke Lokasi DPSP

4. Strategi perusahaan dalam peningkatan rasio elektrifikasi wilayah Sulawesi utara antara lain: (1) Daerah on-grid dengan perluasan JTM dan JTR. (2) Daerah isolated, dengan pembangunan PLTS dan relokasi PLTD. (3) Penggunaan anggaran APLN dan PMN. (4) Program BPBL 2023.

5. Untuk mendukung peningkatan RE di Provinsi Sulawesi Utara masih ada 2 Kabupaten belum 100% desa berlistrik yaitu Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Upaya Percepatan peningkatan RE PLN melalui pembangunan sarana kelistrikan dengan menggunakan

pembangkit PLTS dan PLTD. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.

### REALISASI RASIO ELEKTRIFIKASI PROV. SULUT S.D DESEMBER 2022



- Dari 15 Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara masih terdapat 2 Kabupaten yang belum 100% RDB PLN yaitu Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
- Pada tahun 2022 PLN berhasil melistriki 8 desa sehingga total desa berlistriki di Provinsi Sulawesi utara sebanyak 1823 desa (99,13%). Sisa 16 desa akan dilistriki di tahun 2023 (Lebih cepat 1 tahun dari target 2024).

### KINERJA PENINGKATAN RDB PLN PROV. SULUT

NO	PROPINSI	KOTA/KABUPATEN	REALISASI RE S.D DES 2022		REALISASI RDB S.D DES 2022	
			RE PLN (%)	RE TOTAL (%)	RDB PLN (%)	RDB TOTAL (%)
1	Sulawesi Utara	Kota Manado	99.80	99.99	100	100
2	Sulawesi Utara	Kota Bitung	98.83	99.99	100	100
3	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	99.90	99.99	100	100
4	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	99.84	99.99	100	100
5	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	99.60	99.99	100	100
6	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	99.49	99.99	100	100
7	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	99.34	99.97	100	100
8	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	96.32	99.99	93.41	100
9	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	98.34	99.97	100	100
10	Sulawesi Utara	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	97.60	99.99	94.62	100
11	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	99.91	99.99	100	100
12	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow	99.74	99.99	100	100
13	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	99.09	99.99	100	100
14	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur	99.52	99.99	100	100
15	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	99.00	99.99	100	100
<b>Sulawesi Utara</b>			<b>99.33</b>	<b>99.99</b>	<b>99.13</b>	<b>100</b>

## RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULUTTENGGO



Program Kerja Lisdes (2023-2024)

TA	STATUS	TARGET PEKERJAAN LISDES					
		DESA		ITM	JTR	GARDU	KIT
		LAMA	BARU	kms	kms	kVA	kWp
2023	Luncuran	21	8	0.15	10.88	200	1,323
	Murni	41	8	3.46	26.65	50	1,649
	<b>Total Prov. Sulut</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>3.61</b>	<b>37.53</b>	<b>250</b>	<b>2,972</b>
	Luncuran	22	16	99.40	63.17	3,450	-
	Murni	41	25	293.39	135.80	5,350	4,320
	<b>Total Prov. Sulteng</b>	<b>63</b>	<b>41</b>	<b>393</b>	<b>199</b>	<b>8,800</b>	<b>4,320</b>
	Luncuran	-	-	-	-	-	-
	Murni	42	5	83.89	65.05	3,000	-
	<b>Total Prov. Gorontalo</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>83.89</b>	<b>65.05</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>
	Luncuran	43	24	99.55	74.05	3,650	1,323
Murni	124	38	380.74	227.51	8,400	5,969	
<b>Total SUTG</b>	<b>167</b>	<b>62</b>	<b>480.28</b>	<b>301.55</b>	<b>12,050</b>	<b>7,292</b>	

TA	PROV.	TARGET PEKERJAAN LISDES					
		DESA		ITM	JTR	GARDU	KIT
		LAMA	BARU	kms	kms	kVA	kWp
2024	Sulut	40	-	7	34	1,450	-
	Sulteng	-	54	84	96	1,900	6,640
	Gorontalo	46	-	48	65	3,350	-
	<b>Total SUTG</b>	<b>86</b>	<b>54</b>	<b>137.98</b>	<b>195.83</b>	<b>6,700</b>	<b>6,640</b>

8. Sejauh ini PSO Pelanggan Subsidi yang diberikan ke pelanggan UID Suluttenggo pada Tahun 2021 sebesar Rp 2,84 Trilyun dan Tahun 2022 sebesar Rp. 2,21 Trilyun.

### PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) WILAYAH SULUTTENGGO



#### PSO Pembangunan Lisdes

Tahun	Pagu PMN (Rp Milyar)	Desa Terlistriki	KK Terlistriki
2021	144,35	180 Desa lama dan 60 Desa Baru	14.568
2022	91,49	22 Desa lama dan 1 Desa Baru	1.265
2023	492,19*	167 Desa lama dan 62 Desa Baru	13.466

Keterangan :  
\* Rencana

#### PSO Pelanggan Subsidi

Total subsidi yang diberikan ke pelanggan UID Suluttenggo pada Tahun 2021 sebesar Rp 2,84 Trilyun dan Tahun 2022 sebesar Rp. 2,21 Trilyun

Tahun	Pelanggan	kWh	Subsidi (Rp Milyar)
2021	1.524.084	1.988.400.133	2.838,75
2022	1.589.189	1.987.482.346	2.213,86

Sumber data SAP (Non Audited)

VIDEO

9. PLN memiliki beberapa program keterlibatan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, antara lain: Pembangunan Jembatan Mangrove di Desa Kalinaun, Likupang Timur yang merupakan kolaborasi antara PLN & Lantamal VIII bersama masyarakat untuk menjadikan kawasan wisata.

10. Selain itu, PLN juga melakukan penyalaan 260 pasang baru untuk bantuan PUPR dengan daya R1/900 di Desa Marinsow, Desa Pulisan, dan Desa Kinunang, Likupang Timur. Serta memperluas wawasan masyarakat terkait pengelolaan desa wisata dan potensi lainnya di daerah DPSP dengan menghadirkan Taman Baca Masyarakat.

11. Terkait dengan CSR, PLN menyalurkan bantuan untuk masyarakat dengan 4 prioritas, antara lain: Pengembangan UKM, Create Sharing value, Program pengembangan lingkungan dan Program pendidikan.

**PENYALURAN TJSL/ CSR BERFOKUS PADA 4 PROGRAM PRIORITAS**



**Program Pengembangan UMK**

- Pemberdayaan dan pelatihan **pengelolaan sampah** bagi para pemulung & anak jalanan di TPA Sumompo
- Penyediaan **Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)**, Bahan Baku Awal & Pelatihan Pengrajin Kain Cofo
- Total Nilai Bantuan Rp. 578.470.000



**Program Create Sharing Value**

- Electrifying Lifestyle – **Peralatan penunjang** (kios, kompor induksi, blender) desa wisata di Bolaang Mongondow
- Electrifying Lifestyle – **Cold Storage & Ice Maker** untuk kelompok nelayan di Kab. Kepulauan Sangihe
- Electrifying Agriculture – Pencahayaan untuk **Budidaya Tanaman Krisan** di Kota Tomohon sebagai Kota Bunga dengan **International Festival Flower**
- Total Nilai Bantuan Rp. 496.702.500



**Program Lingkungan**

- 6 Lokasi **penghijauan** tersebar di Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kota Manado
- Sebanyak 50.000 **anakan mangrove & pohon produktif**
- Total Nilai Bantuan Rp. 376.712.500



**Program Pendidikan**

- Layanan **Internet Pintar** untuk 5 Sekolah tersebar di Kota Manado dan Kota Bitung
- 7 **Taman Baca Masyarakat (TBM)** Tersebar di Kota Manado, Kab. Minahas Utara dan Kota Bitung
- Total Nilai Bantuan Rp. 835.000.000



TJSL Pendidikan & Lingkungan disalurkan untuk masyarakat sekitar lokasi DPSP KEK Likupang

**III. CATATAN DAN REKOMENDASI**

Dari pertemuan yang dilakukan kepada seluruh mitra pada saat pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian mitra (Kementerian/Lembaga) atau BUMN yang diundang dalam pertemuan. Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

**1. Bapak Harris Turino (Ketua Tim/ Fraksi PDIP)**

- PLN berhasil membangun konsep *Power Beyond Generation*, di wilayah Sulawesi Utara.
- Namun terdapat *over supply* (kelebihan 160 MW), disisi lain ada rencana pembangunan baru yang mencapai 783 MW. Sedangkan kebutuhan likupang hanya 49 MW. Angka tersebut untuk kebutuhan kapan dan berapa lama angka tersebut eligible?
- Mengenai elektrifikasi, sudah 99,99% kecuali daerah kepulauan, dan diketahui bahwa biaya pemasangan listrik bisa sampai 25 juta, sehingga PLN perlu dibantu secara pembiayaan.
- Sejauh mana keyakinan bapak mengenai rencana RE di daerah tertinggal?
- PMN 2023 untuk PLN memang diperlukan tanpa ditawarkan karena benar-benar dibutuhkan di daerah terluar.
- PSO subsidi pada 2021 dan 2022, masing-masing 2 T, tinggi sekali kebutuhannya padahal hanya mencakup 3 provinsi (Sulut, Sulteng, Gorontalo)
- *Creating share value* perlu dikembangkan lebih lanjut dari pada CSR perusahaan, karena akan ada keuntungan bagi perusahaan pemberi CSR.
- Pembangunan menggunakan solar panel dan berbasis green energy memang diperlukan bagi wilayah-wilayah Indonesia timur yang memerlukan kestabilan arus listrik.

## **2. Bapak Sarmuji (Fraksi Partai Golkar)**

- Harapannya agar koordinasi dan kerja sama antara PLN dan Komisi VI dapat berjalan konstruktif.
- Presentasinya sudah bagus dan informatif, masukannya akan dibawa ke RDP Komisi VI DPR RI dengan PLN dan Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN

## **3. Ibu Trifena (Fraksi Partai Golkar)**

PLN di wilayah ini sudah cukup bagus, namun kenapa di Papua masih belum baik? Saya merekomendasikan agar PMN berikutnya diprioritaskan di wilayah Papua. Selama ini daerah pesisir Papua memang sudah banyak berlistrik, namun di wilayah pegunungan belum. Harusnya mendapatkan perhatian.

## **4. Bapak Tommy Kurniawan (Fraksi PKB)**

- Apresiasi terhadap kinerja yang baik atas tugas mulia melistriki daerah yang tidak mudah.
- Perlu diantisipasi adanya kelebihan daya, agar perlu dioptimalkan agar tidak merugikan keuangan PLN ke depannya.

## **5. Bapak La Tinro (Fraksi Partai Gerindra)**

Peraturan mengenai kontrak kerja sama investasi pembangkit listrik kerap berubah-ubah terus, sehingga investor tidak memiliki kesempatan berbisnis pembangkit listrik. Perlu diperhatikan dengan baik, agar PLN juga tidak kesulitan dikemudian hari.

## **IV. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 3 Februari 2023  
Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI  
Kota Manado, Sulawesi Utara

**TTD.**

**Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.  
A-199**

**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI KEGIATAN**



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 ke Manado, Sulawesi Utara



Suasana rapat hybrid Kunjungan Kerja Spesifik di Bandara Sultan Babullah, Tarnate



Peserta rapat yang mengikuti rapat secara zoom dari Manado



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI, Bpk. Haris Turino sedang memberikan sambutan



Sesi Tanya Jawab Oleh Ibu Trifena untuk PLN Suluttenggo



Sesi Tanya Jawab Oleh Bapak Tommy Kurniawan untuk PLN Suluttenggo



Suasana diskusi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bandara Sultan Babullah



Setelah Rapat Hybrid selesai dilaksanakan, peserta rapat bertepuk tangan karena telah menyelesaikan tugasnya ditengah cuaca buruk